

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan. Seluruh upaya pendidikan yang dilakukan tidak luput dari peran biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Biaya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Saat ini, sebagian masyarakat berasumsi bahwa dengan adanya pendidikan gratis seluruh biaya pendidikan itu ditanggung oleh sekolah. Hal ini kiranya perlu diluruskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan gratis adalah pembebasan dari biaya berupa SPP, pendaftaran, pelaksanaan Ujian Nasional dan lain-lain.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal, (1) biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. (2) biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. (3) biaya operasional satuan

pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Menurut Supriadi (2006:7) besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa. Oleh sebab itu, dalam konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman terhadap berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman dimaksud merentang dari hal-hal yang sifatnya kecil (satuan pendidikan) hingga yang besar (nasional), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya di tingkat sekolah.

Pembiayaan pendidikan di Indonesia yang berlangsung saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan mutu (kualitas) pendidikan itu sendiri. Apabila pembiayaan pendidikan di sekolah dilaksanakan sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan yang ada, tentunya akan menghasilkan sekolah-sekolah yang bermutu sehingga sekolah tersebut mampu bersaing baik ditingkat nasional maupun internasional. Mutu sekolah merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Mutu menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, pejabat

pemerintah untuk bekerja sama, guna memberikan kepada para peserta didik sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Saat ini, begitu banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki mutu sekolah baik yang bersifat mikro maupun makro mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Namun kenyataan yang ada hasilnya belum begitu menggembirakan ketika melihat *output* yang dikeluarkannya.

Pada prinsipnya, sekolah sebagai satuan pendidikan tidak akan menjadi bermutu baik atau unggul dengan sendirinya, melainkan melalui berbagai upaya peningkatan mutu pendidikannya. Disini kepala sekolah bersama *stakeholders* lainnya berusaha melakukan perubahan agar sekolah menjadi lebih baik. Sehingga bilamana ada sekolah yang baik, maka dapat diamati bagaimana sekolah yang baik tersebut melakukan berbagai program peningkatan mutu, berbagai perubahan, atau berbagai pembaruan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah hanya akan terjadi efektif bilamana dikelola melalui manajemen yang tepat. Selama ini peningkatan mutu pendidikan cenderung melalui manajemen yang sentralistik. Begitu banyak program peningkatan mutu pendidikan di sekolah ditetapkan dan diupayakan secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Begitu banyak program pelatihan guru dirancang dan dilaksanakan secara terpusat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Betapa banyak *dropping* buku-buku perpustakaan, buku-buku pelajaran diupayakan secara terpusat, dan sekolah tinggal menerima yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat, apakah barang-barang tersebut dibutuhkan oleh sekolah atau tidak ?. Pendek kata, peningkatan mutu pendidikan sementara ini kurang memperhatikan kondisi atau tidak berbasis

sekolah. Akibatnya, peningkatan mutu pendidikan di sekolah tetap tidak banyak mengalami keberhasilan, karena tidak sesuai dengan kondisi sekolah, juga tidak dibarengi oleh upaya-upaya dari sekolah yang bersangkutan. Akibatnya hal tersebut berdampak menghambur-hamburkan biaya pendidikan (mubazir). Peningkatan mutu pendidikan sekolah akan terjadi bilamana ada kemauan dan prakarsa dari bawah di mana kepala sekolah, guru, orang tua siswa bersama komite berkemauan dan bekerja keras berupaya mengembangkan program-program peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan memanfaatkan biaya pendidikan seoptimal mungkin guna tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Demi mencapai mutu sekolah yang baik, maka diperlukan peranan guru sebagai pendidik yang andal dan berkualitas. Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Uraian pasal 42 ini cukup jelas, yakni untuk menjadi guru, sebagai tahapan awal harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimal (latar belakang pendidikan keguruan/umum dan memiliki akta mengajar). Setelah guru memenuhi persyaratan kualifikasi, maka guru akan dan sedang berada pada tahapan kompetensi. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pendidik di sekolah masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan mutu di sekolah dalam rangka menghasilkan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan masih belum optimal.

Pada saat kegiatan observasi awal di beberapa sekolah dasar khususnya di SDN 2 Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohuwato penulis menemukan bahwa begitu besarnya biaya pendidikan yang diperoleh sekolah dari berbagai sumber dan telah dialokasikan untuk berbagai komponen, diantaranya pembiayaan terkait dengan pengembangan kegiatan guru, pengembangan sarana dan prasarana serta untuk kegiatan pengembangan siswa. Melihat kenyataan ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Pengalokasian Pembiayaan Pendidikan di SDN 2 Botubilotahu Kecamatan Marisa ”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian pembiayaan pendidikan untuk pengembangan kegiatan guru di SDN 2 Botubilotahu Kecamatan Marisa
2. Pengalokasian pembiayaan pendidikan untuk pengembangan sarana dan prasarana di SDN 2 Botubilotahu Kecamatan Marisa
3. Pengalokasian pembiayaan pendidikan untuk pengembangan kegiatan siswa di SDN 2 Botubilotahu Kecamatan Marisa

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengalokasian biaya pendidikan pengembangan kegiatan guru di SDN 2 Botubilotahu Kecamatan Marisa

2. Untuk mengetahui bagaimana pengalokasian biaya pendidikan pengembangan sarana dan prasarana di SDN 2 Botubilotahu Kecamatan Marisa
3. Untuk mengetahui bagaimana pengalokasian biaya pendidikan pengembangan kegiatan siswa di SDN 2 Botubilotahu Kecamatan Marisa

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Sebagai bahan masukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional dalam rangka memperbaiki pembiayaan pendidikan.
2. Penelitian ini berguna bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembiayaan pendidikan.
3. Penelitian ini juga berguna bagi semua guru untuk lebih meningkatkan profesionalisme melalui biaya pendidikan yang lebih baik.
4. Melalui penelitian ini diharapkan seluruh komponen sekolah mampu meningkatkan pembiayaan pendidikan.
5. Bagi lembaga (instansi) yang terkait, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan baik saat ini maupun yang akan datang.

### **E. Definisi Istilah**

1. Pengalokasian adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan.
2. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu peningkatan laba.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.